

**ISU DISKRIMINASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA KEPADA WARIA
(KAJIAN STRATEGI KOMUNIKASI TERKAIT
PERLINDUNGAN WARIA DI INDONESIA)**

Oleh: Monica Bulan dan Wa Ode Seprina *

ABSTRACT

Republic of Indonesia is one of the biggest countries in the world. It has approximately 238 million inhabitants among over 17.500 islands in different culture, language, lifestyle, etc. All the difference has become unique as it is all covered by national motto which is called Bhineka Tunggal Ika. With all the differences, it comes discriminations in various backgrounds such as discrimination against race, ethnic, age, gender, social economic, etc. Discrimination has become an issue in Indonesia and one of the cruelest discriminations that have happened in the country. Discrimination against transvestites has become an issue since a long time ago in Indonesia.

This issue is still happening around us in Indonesia although there is a law to fight against the issue. As what Crable and Vibbert said "an issue is created when one or more human agents attaches significance to a situation or perceived problem" (Gaunt, 1995). The Indonesian Ministry of Justice and Human Rights is a government institution which is specialized in liability of protection and human rights for Indonesians. It is their responsible to protect all Indonesian citizen no matter who they are, what their social background are and etc. The Ministry have to inform Indonesians that transvestites deserve to be treated like other Indonesian citizen and there is no discrimination on the implementation of policy for transvestites. All they need is a proper communication.

Keywords: Communication Strategy, Discrimination, Shemale, Human Right

* Penulis adalah dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki sekitar 238 juta penduduk dari 17.500 pulau dengan budaya, bahasa, gaya hidup yang berbeda. Semua perbedaan ini dapat dikatakan unik karena tertutup oleh semboyan nasional yaitu *Bhineka Tunggal Ika*. Ini berarti meskipun berbeda dalam banyak hal, tetapi semua masih orang Indonesia. Dengan semua perbedaan tersebut, diskriminasi masih saja terjadi. Diskriminasi ini antara lain terjadi pada perbedaan ras, etnis, usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Diskriminasi juga menjadi isu di Indonesia dan salah satu diskriminasi yang kerap terjadi adalah diskriminasi terhadap waria yang merupakan singkatan dari wanita pria. Hal ini mengacu pada seorang pria yang berubah menjadi seorang wanita baik secara fisik maupun mental. *Kehadiran seorang waria merupakan suatu proses yang panjang, baik secara individual maupun sosial. Secara individu antara lain, lahirnya perilaku waria tidak lepas dari suatu proses atau dorongan yang kuat dalam dirinya, bahwa fisik mereka tidak sesuai dengan kondisi psikis (Koeswinarno,2004:3)*

Di Indonesia, ada dua jenis waria, transgender dan transeksual. Transgender terkait dengan cara pria mengekspresikan identitas mereka berlawanan dengan seksualitas mereka dengan cara bertindak dan berpakaian seperti wanita. Di sisi lain, transeksual berarti seorang pria yang mengubah fisik mereka secara nyata untuk menjadi seorang wanita penuh dengan melakukan operasi berisiko. Entah itu transgender atau transeksual, tidak ada banyak orang Indonesia yang menerima keberadaan mereka. Diskriminasi terhadap waria telah menjadi isu sejak lama. Kebanyakan masalah diskriminasi datang ketika berhubungan dengan perlindungan hukum waria dan hak asasi manusia (HAM) sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Diskriminasi adalah suatu kondisi ketika Anda berpikir dan bertindak berbeda dan tidak biasa untuk orang lain yang berbeda dari Anda dan mereka mengabaikan Anda untuk siapa Anda dan memperlakukan Anda berbeda dari orang lain.

Masalah ini masih terjadi di Indonesia meskipun ada hukum untuk mengatasi masalah ini . Seperti yang dikatakan oleh Crable dan Vibbert bahwa sebuah masalah terbentuk ketika satu atau lebih orang menitikberatkan kepada sebuah fenomena atau peristiwa penting dan membuatnya menjadi sebuah masalah yang dapat dirasakan oleh

banyak orang (Gaunt, 1995). Selain itu, banyak orang di Indonesia yang memperlakukan waria secara tidak adil dalam banyak hal. Contohnya saja sulit sekali bagi waria untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat dan layak bagi dirinya. Setidaknya terdapat 2.000 waria di Jakarta dan banyak dari mereka bekerja di jalanan sebagai musisi jalanan dangdut atau pekerja seks komersil (PSK). Semua terjadi akibat tidak ada banyak perusahaan yang ingin menerima para waria untuk bekerja karena penampilan mereka sebagai waria ("Waria perjuangan," 2010). Beberapa orang juga takut atau bahkan tidak ingin bersosialisasi dan dekat dengan waria untuk alasan tertentu. Penolakan seperti ini juga berdampak kepada kehidupan sosial mereka yang terisolasi karena mereka memilih untuk menjadi "berbeda" (waria). Dalam sebuah artikel surat kabar *The Jakarta Post* ("Life as," 2010) masalah diskriminasi juga dapat masuk ke dalam ranah kekerasan fisik yang diakibatkan oleh cara orang memperlakukan mereka.

Semua kekerasan fisik yang muncul di media massa bukan hanya disebabkan oleh warga sipil namun orang-orang atau institusi yang justru seharusnya juga melindungi hak para waria tersebut. Salah satu media cetak lokal di Jakarta, *The Jakarta Post* pernah memberitakan, Satpol PP kerap kali melakukan pembersihan atau razia terhadap waria yang disertai dengan kekerasan ("*Transgender groups*," 2011). Sebagai bagian dari departemen pemerintah, mereka seharusnya tidak melakukan hal tersebut kepada waria karena mereka masih bagian dari warga negara dan harus dilindungi. Banyak koruptor di Indonesia yang melakukan penyimpangan dan menyebabkan masalah yang lebih besar namun mereka tidak pernah mendapat perlakuan atau tindak kekerasan seperti yang dialami oleh waria.

KBRI 68H pernah memberitakan bahwa waria juga digambarkan sebagai orang berdosa yang paling tidak diterima karena mereka dilarang untuk berdoa di masjid oleh orang-orang namun pada kenyataannya, tidak ada hukum untuk memblokir jalan mereka untuk menyembah Allah ("Ssst ... ada," 2010). Sayangnya, di negara lain, waria dilindungi dan mereka mendapatkan hak asasi mereka serta dapat kita lihat di Negara Perancis atau Thailand.

Agar dapat diterima dalam kehidupan sosial bermasyarakat, waria juga telah mencoba untuk lebih dekat dengan menunjukkan rasa hormat pada lingkungan dan masyarakat. Ketika Gunung Merapi meletus 2011 lalu, para waria datang membantu

mengevakuasi korban, memberikan sumbangan dan menawarkan potong rambut gratis atau dengan cara lain seperti melakukan kampanye “*safety sex*” dan AIDS (“Waria asuh,” 2011). Mereka melakukan semua hal yang baik karena mereka sadar bahwa sebagai manusia, kita harus saling membantu.

Perlindungan hukum dan kebijakan hak asasi manusia telah dibuat sejak lama namun pelaksanaan kebijakan untuk waria tampaknya berbeda dengan warga biasa meskipun mereka masih warga negara Indonesia dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Waria juga layak untuk dilindungi oleh perlindungan hukum dari tindak kekerasan, pelecehan, anarki masyarakat, diskriminasi dan diperlakukan seperti warga negara Indonesia lainnya dengan memberikan hak-hak asasi mereka. Itulah sebabnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab atas masalah ini. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi semua warga negara Indonesia tidak peduli siapa mereka, apa latar belakang sosial mereka, dan lain sebagainya. Hal pertama yang muncul dalam pikiran orang ketika mereka mendengar kata hak asasi manusia dan kebijakan perlindungan, pasti mengarah kepada Departemen Hukum dan HAM.

ISSUE LIFE CYCLE

Masalah diskriminasi terhadap perlindungan hukum dan HAM yang dialami oleh para waria di Indonesia telah lama terjadi. Dengan melakukan *environmental scanning* (Lang, 1994) masalah ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Faktor ekonomi yang dikarenakana minimnya kesempatan bagi waria untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga para waria lebih sering bekerja di jalanan. Hal ini menyebabkan sebagian orang meremehkan waria sehingga mereka mampu melakukan tindak kekerasan terhadap waria.

Kemudian, pemerintah secara tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam diskriminasi terhadap waria. Pemerintah mengatakan bahwa mereka masih berusaha untuk membantu waria dengan melindungi mereka sebagai apa yang telah tertulis dalam kebijakan. Sayangnya, kekerasan masih kerap terjadi dan penanganan atas kasus kekerasan terhadap waria masih kurang. Selain itu, diskriminasi terhadap waria juga terjadi karena

masalah sosial. Beberapa orang tetap saja menggambarkan waria sebagai kriminal atau kejahatan ("Waria berjuang," 2010).

Faktor-faktor tersebut adalah alasan utama mengapa diskriminasi terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia waria perlu diperhatikan dan diketahui oleh khalayak. Khalayak perlu diberi pemahaman bahwa waria juga merupakan bagian dari masyarakat sosial sehingga tidak ada lagi tindak kekerasan yang dialami oleh para waria. Hal ini harus diperhatikan karena isu ini merupakan masalah eksternal dan tentu dapat mempengaruhi kebijakan publik. Moore mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan masalah yang terjadi dalam domain publik di mana dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk mengelola masalah tersebut dan menetapkan langkah untuk menyelesaikannya (Gaunt, 1995).

Dutton dan Ottensmeyer berpendapat bahwa masalah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu masalah yang terjadi di dalam organisasi dan di luar organisasi tetapi masih mempengaruhi organisasi itu sendiri (Gaunt, 1995). Walaupun masalah waria ini terjadi di luar Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sudah menjadi suatu keharusan bagi instansi tersebut untuk memperhatikan isu tersebut. Langkah untuk menyelesaikan isu ini tentu harus berawal dari institusi ini karena mereka merupakan lembaga resmi pemerintah yang berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, melakukan kebijakan nasional dari pusat departemen untuk departemen regional dan yang juga membantu presiden untuk menjalankan pemerintahan.

Terdapat lima tingkat dasar status masalah seperti *potential status*, *imminent status*, *current status*, *critical stage*, *dormant* (Gaunt, 1995). Isu ini diklasifikasikan sebagai tahap *dormant* karena masalah ini pernah muncul sebelumnya dan masih berlanjut. Media massa pun hanya mengangkat berita terkait diskriminasi waria saat isu tersebut muncul dan kembali tenggelam seiring dengan berjalannya waktu.

STAKEHOLDER DAN MASYARAKAT

Mengidentifikasi stakeholder

Ada beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan permasalahan ini. Mereka memiliki pengaruh dan andil yang cukup besar, antara lain: Komnas HAM, Satpol PP, LSM,

pengacara, departemen pemerintah, media (jurnalis), Forum Komunikasi Waria Indonesia, dan lain-lain. Akan tetapi organisasi yang paling berpengaruh terhadap masalah ini adalah Komnas HAM, Satpol PP dan Forum Komunikasi Waria Indonesia. Masing-masing dari mereka mengambil tindakan sendiri untuk masalah ini.

Komnas HAM juga dikenal sebagai lembaga kedua setelah lembaga pemerintah yang berpengaruh terhadap hukum dan HAM di Indonesia. Selama ini, Komnas Ham telah membuat beberapa gerakan dalam menangani perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi waria, tetapi masih belum ada "lampu hijau" dalam mengurangi masalah ini. Satpol PP merupakan bagian dari lembaga pemerintah tetapi dalam liputan media, mereka melakukan pelecehan dalam penertiban waria di jalanan, lembaga pemerintah lainnya mungkin yang harus melindungi warga negara mereka tidak peduli siapa mereka . Forum Komunikasi Waria Indonesia adalah sebuah organisasi yang benar-benar tahu bagaimana menangani perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi para waria. Mereka mungkin dapat membuat perubahan untuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

Publik

Diskriminasi terhadap perlindungan hukum waria dan hak asasi manusia pasti mendapat perhatian publik . Seperti Dewey mengatakan bahwa keberadaan masyarakat telah dibagi menjadi tiga tahap seperti *public laten*, publik sadar, dan aktif masyarakat (Grunig, 1979).

Tabel Tipe Publik

<i>Latent Public</i>	<i>Aware Public</i>	<i>Active Public</i>
Siswa / Mahasiswa	Komunitas	NGOs
Ibu Rumah Tangga	Mahasiswa hukum	Pengacara
Pekerja		SATPOL-PP
<i>Lower educated people</i>		Komnas HAM
		Forum Komunikasi Waria Indonesia,

ANALISIS ISU KRITIS

Isu Prioritas

Setiap masalah memiliki skala prioritas tersendiri. Banyak orang, kelompok atau lembaga yang masih harus memilih mana masalah yang perlu ditangani dengan segera. Hal ini tentu diperlukan untuk menentukan prioritas apa yang harus dilakukan segera dengan mengambil isu-isu penting. Tetapi juga tidak berarti bahwa mereka harus membiarkan masalah kecil tanpa penanganan. Masalah ini masih sering diklasifikasikan sebagai masalah lokal karena hanya terjadi di beberapa kota di Indonesia tetapi kasus terbanyak sampai hari ini masih diberitakan berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apabila lembaga bersangkutan tidak menangani kasus-kasus diskriminasi ini sesegera mungkin, mungkin ada tindakan kekerasan lain dan spekulasi terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi waria di kota-kota lain Indonesia.

Pendekatan Komunikasi

Ada empat model PR (Grunig & Hunt, 1984) seperti *press agentry* atau publisitas, informasi publik, dua cara asimetris dan dua arah simetris. Menurut Gruni, komunikasi yang ideal adalah dua arah simetris namun pada kenyataannya, sebagian besar PR selalu melakukan dua arah asimetris sebagai publik tidak melakukan apa yang Anda meminta mereka untuk melakukan dalam kampanye PR. Untuk menangani masalah ini, kita perlu melakukan *press agentry* untuk masalah ini sehingga masyarakat tahu akan informasi masalah ini. Selanjutnya, informasi publik, misalnya data dari Komnas HAM tentang berapa banyak korban diskriminasi ini atau data dari setiap instansi pemerintah untuk menunjukkan kepada publik bahwa masalah ini serius dan perlu mendapat perhatian. Akhirnya, persuasi untuk masalah ini diharapkan akan dua arah asimetris. Ini adalah tahap di mana masyarakat mendengarkan apa pun yang Anda katakan dan yang benar-benar dibutuhkan untuk masalah ini. Publik diharapkan segera sadar dengan masalah ini dan pada akhirnya, mereka dapat memperlakukan waria dengan cara yang benar tanpa diskriminasi terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi waria.

STRATEGI KOMUNIKASI (*COMMUNICATION PLAN*)**Masalah Tantangan**

Beberapa orang masih mengabaikan keberadaan waria dan tidak menghargai mereka. Sudah seharusnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap waria dan membuat orang tahu bahwa ada hukum untuk melindungi waria serta waria pun memiliki hak yang sama dengan warga sipil lainnya. Pesan utamanya adalah waria juga masih manusia dan warga negara seperti yang lainnya. Dari perspektif tersebut maka para waria pun layak kesempatan yang sama dan pelaksanaan perlindungan hukum dan HAM yang ada di Indonesia.

Analisis Situasi (*Situation Analysis*)**Tabel 4.2 Analisis Situasi**

<p><i>Strengths</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat undang-undang dan kebijakan • Sah dimata hukum, modal banyak • Memiliki pusat hukum di setiap kota di Indonesia untuk konsultasi • pekerja Kompetensi dan kredibel • Semua departemen di Kementerian Hukum dan HAM memiliki standar yang baik untuk melayani masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia. 	<p><i>Weaknesses</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi • Korupsi • Lembaga tidak membuat banyak klarifikasi terhadap hukum dan kebijakan untuk waria.
<p><i>Opportunities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Didukung oleh LSM 	<p><i>Threats</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kebijakan dan waria tidak yakin namun di luar sana karena diskriminasi masih ada • Cara orang berpikir Waria

Tujuan (Goal)

Tujuannya agar masalah ini adalah untuk membuat kesadaran keuntungan publik, menghormati Waria dan jelas semuanya tentang masalah ini sehingga masyarakat akan mengubah pola pikir dan pendapat mereka atas perlindungan hukum waria dan hak asasi manusia dengan tujuan agar waria akan diterima dalam kehidupan sosial yang sebenarnya dan mendapatkan hak-hak mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, kesempatan untuk menyembah Allah dan perlindungan hukum seperti warga negara lainnya.

Sasaran

1. Membangun kesadaran dan kepekaan terhadap diskriminasi hukum hak asasi dan perlindungan waria pada 40% penduduk Jakarta dari Juli 2013-September 2013 dengan cara menginformasikan khalayak tentang hal tersebut sesering mungkin melalui media massa yang ada.

Untuk membangun kesadaran publik, ada 4 cara untuk melakukan seperti melakukan *press release*, iklan, jaringan sosial dan kampanye di jalan (pusat keramaian).

- Siaran pers diperlukan untuk menginformasikan media tentang masalah ini. Hal ini diperlukan untuk menjelaskan masalah ini dengan mengundang media massa (media TV, cetak, radio dan media online) dengan harapan mereka menempatkan isu ini dalam editorial mereka dan mendapatkan perhatian bagi media dan khalayak.
- Iklan digunakan untuk menyebarkan isu kepada khalayak karena di zaman ini, khalayak Indonesia menggunakan media setiap saat. Mereka menonton TV, mereka mendengarkan radio, mereka membaca koran atau majalah, dan lain sebagainya.
- Media sosial akrab digunakan oleh penduduk Indonesia saat ini. Jadi, jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan simpati khalayak dengan memberikan *link website* tertentu, cerita dan kampanye tentang isu ini.

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat berkontribusi didalamnya. LSM dan Forum Komunikasi Waria Indonesia melakukan kampanye di jalan-jalan dan memilih duta untuk mendukung perlindungan hukum waria dan HAM dengan tujuan agar orang-orang menyadari tentang masalah ini dan mulai tertarik dan mendukung untuk melawan diskriminasi terhadap perlindungan hukum waria dan HAM.
2. Mensosialisasikan isu ini kepada 300 penduduk di 3 kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya selama 3 bulan berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat *events* atau acara di pusat-pusat keramaian.
 - Seminar dibutuhkan untuk menginformasikan dan mensosialisasikan isu ini kepada khalayak. Melalui seminar ini, stakeholder dapat menyediakan informasi mendetail mengenai isu tersebut kepada khalayak
 - Menyelenggarakan *talkshows* untuk mengajak khalayak untuk mengetahui lebih dalam tentang isu tersebut. Hal yang dibicarakan tidak hanya sekedar sebuah kebijakan pemerintah tetapi juga menyentuh hati masyarakat dengan menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana kehidupan waria yang sulit
 - Untuk mendukung isu ini, teater di jalan dapat dijadikan sebagai sebuah cara untuk mensosialisasi masalah ini . Masyarakat akan tertarik menonton tentang kisah hidup mereka menjadi korban pelecehan , kebodohan, kekerasan publik, dan lain sebagainya.
 3. Mendapatkan dan menjaga *interest* 40% penduduk Jakarta tentang isu ini selama 4 bulan untuk mengurangi kesalahpahaman tentang waria. Sudah seharusnya isu ini dan dilontarkan oleh *opinion leader* seperti pengacara, polisi, duta perlindungan hukum waria dan HAM, atau bahkan waria itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat memberikan simpati terhadap masalah ini dan melawan diskriminasi terhadap waria.
 - *Social events* yang diperlukan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa waria tidak seburuk yang mereka pikirkan. Kegiatan ini dapat

berupa proyek amal, sumbangan dan lain sebagainya. LSM dan waria dapat bergabung dalam kegiatan ini.

- *Blogging* diperlukan untuk menginformasikan dan menjelaskan masalah ini ke khalayak. Masyarakat mungkin mendengarkan yang dikatakan pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM yang merupakan salah satu organisasi paling berpengaruh dalam isu ini. *Blog* resmi lebih ditekankan daripada blog acak yang dikumpulkan dalam satu kategori *folder*. *Blog* juga perlu diperbarui segera setelah masalah lainnya yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap waria muncul di media dan masyarakat.
- Melakukan sebuah wawancara dengan *opinion leader* dan ahli dibidangnya. Khalayak akan percaya pernyataan mereka karena mereka mengetahui secara detail tentang masalah ini. Wawancara dengan korban juga penting untuk mendapatkan lebih banyak simpati di depan umum.

Sasaran Publik

- Sasaran untuk isu ini adalah mereka yang belum tahu isu ini secara rinci seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, orang-orang dengan tingkat pendidikan kurang, pekerja dan orang-orang yang tahu masalah ini tapi mereka berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi dan terus melakukan pelecehan terhadap waria seperti masyarakat Front Pembela Islam (FPI), Satpol PP dan lain sebagainya. Kemudian, bagi *active public* untuk mendukung dan mendapatkan lebih banyak simpati untuk isu ini seperti LSM, pengacara, waria itu sendiri (Forum Komunikasi Waria Indonesia) dan Komnas HAM.

Sasaran Media

Untuk membantu mendapatkan kesadaran dan ketertarikan khalayak, media digunakan sebagai alat penyebaran informasi. Banyak masyarakat Indonesia hari ini memiliki gaya hidup teknologi yang tinggi dan dapat memperbarui diri mereka dengan isu-

isu yang lahir dari sosial media. Media diharapkan dengan memberikan kesadaran kepada khalayak terhadap isu ini.

Koran

Beberapa media cetak yang diperlukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang masalah seperti Kompas, Rakyat Merdeka, Suara Pembaruan, The Jakarta Post, Jakarta Globe, Media Indonesia, Tempo . Media tersebut merupakan surat kabar nasional. Koran-koran tersebut memiliki editorial yang berbed-beda, jurnalisme profesional dan memiliki pengaruh kepada pembaca melalui liputan media mereka.

Televisi

Isu ini tentu membutuhkan perhatian dari media televisi. Televisi merupakan alat yang ampuh untuk menyebarkan pesan komunikasi. **Faktanya**, orang Indonesia suka menonton televisi selama lebih dari 8 jam sehari. Hal tersebut harus dimanfaatkan secara baik dengan mengambil atensi khalayak melalui televisi. Isu waria ini lebih ditekankan kepada masalah sosial, untuk itu media yang dapat digunakan yaitu RCTI, TVOne, ANTV, SCTV, Indosiar, Metro TV, MNC TV, Global TV, Trans TV, Trans 7 untuk membantu menyebarkan informasi. Media-media tersebut sangat dianjurkan karena mereka memiliki program yang baik dan mendidik masyarakat melalui program-program TV mereka.

Radio

Untuk membantu mensosialisasikan masalah ini ke publik, radio juga bisa menciptakan kesadaran dalam publik. Radio yang dapat digunakan yaitu Women Radio , Elshinta FM , Trijaya FM. Radio tersebut telah disesuaikan dengan segmentasi mereka di radio mereka dekat dengan publik sasaran isu tersebut.

Media Online

Cara lain untuk menginformasikan kepada masyarakat adalah dengan menggunakan media online. Kini, khalayak dapat mengakses segala sesuatu melalui jaringan internet. Disarankan untuk menggunakan media online seperti detik.com , VivaNews.com dan

Kompas.com untuk berita online dan MivoTV untuk TV online serta Facebook dan Twitter untuk lebih menginformasikan khalayak tentang isu ini.

Teknik Persuasi

Teknik persuasi adalah teknik komunikasi untuk mengubah perilaku, persepsi dan sikap seseorang. Waria yang selalu digambarkan sebagai korban atas pelecehan, kekerasan, kebodohan dan lain sebagainya. Untuk itu, waria berhak mendapatkan perhatian publik dengan cara-cara menarik dan kreatif. Contohnya, dengan melakukan teater jalanan tentang bagaimana kehidupan waria yang sulit yang mungkin akan menyentuh hati khalayak sehingga memperoleh lebih banyak simpati. Selain itu, saat melakukan kampanye jalanan di jalan, semua peserta memakai gelang biru untuk menunjukkan bahwa mereka peduli dan perlindungan hukum dan HAM bagi waria. Untuk membujuk publik, diperlukan juga seseorang sebagai duta yang mewakili isu ini. Seseorang yang mampu dan mengetahui secara persis isu ini. Dorce Gamalama dapat dipilih untuk menjadi duta diskriminasi waria dalam perlindungan hukum dan HAM bagi kaum waria. Dorce Gamalama adalah seorang transgender yang juga pembawa acara di Indonesia. Waria perlu bersosialisasi di depan umum untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa mereka juga orang biasa yang layak diperlakukan dengan baik.

KESIMPULAN

Diskriminasi terhadap perlindungan hukum dan HAM pada waria adalah sesuatu yang perlu ditangani sebelum isu tersebut menjadi semakin buruk. Pelaksanaan perlindungan hukum waria dan HAM tampaknya belum tepat. Dalam liputan media, waria selalu digambarkan sebagai korban tindak kekerasan. Hal tersebut berdampak kepada perspektif dan opini yang negatif terhadap waria. Masalah ini bukanlah sesuatu yang baru. Masyarakat pun melihat dan mendengar masalah ini. Kenyataannya waria masih manusia dan mereka perlu dilindungi seperti warga lainnya. Dengan membiarkan masalah ini di depan umum, sama saja membiarkan masyarakat berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan kebijakan

dan juga pelaksanaan kebijakan tersebut. Di sisi lain, beberapa orang masih melakukan tindakan kekerasan terhadap waria dan itu benar-benar menentang kebijakan itu sendiri .

Kita perlu untuk menghentikan publik dari pola pikir dan pendapat waria mereka tidak layak kebijakan dan beberapa mungkin berpikir kebijakan tersebut tidak berhasil dilaksanakan oleh pemerintah dan beberapa institusi . Untuk menangani masalah ini, PR yang baik dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk menjawab masalah ini . Ada 3 tujuan untuk menangani masalah ini seperti membangun kesadaran masyarakat, mensosialisasikan masalah ini ke publik sehingga publik akan tahu dan memahami apa yang terjadi dan tetap menaruh simpati mereka untuk tetap melawan diskriminasi waria dalam perlindungan hukum dan HAM. Tujuannya adalah untuk membuat orang memahami dan mengubah pendapat mereka tentang pelaksanaan kebijakan sehingga mereka menunjukkan rasa hormat dan simpati kepada waria.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditya, Andreas, & Hans Tampubolon “*Transgendered Group Wants No Violence Officers*” (2011, February 23) retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/23/transgendered-group-wants-no-violence-officers.html>
- Gaunt, Phillip, & Jeff Ollenburgers. (1995). *Issues Management Revisited: A Tool That Deserves Another Look*. *Public Relations Review*, 21(3), 199-210.
- Grunig, James. (1979). *A New Measure of Public Opinions on Corporate Social Responsibility*. *The Academy of Management Journal*, 22(4), 738-764.
- Haryono, Nico. “*Transvestites Foster Tolerance*” (2011, March 19), *The Jakarta Post* retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/19/transvestites-foster-tolerance.html>
- KBRI. “*Ssst... Ada Pesantren Waria di Indonesia*” (2010, September 18) retrieved from http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=id&q=cache:Yfh_WQ_Ary&J:htp://www.indonesiamedia.com/2010/09/18/ssst-ada-pesantren-waria-di-indonesia/+indonesian+waria&ct=clnk
- Lang, Trudi. (1994). *An Overview of Four Futures Methodologies (Delphy, Environmental Scanning, Issue Management, Emerging Issue Analysis)*. *Politic Science* 672.1-19
- Transvestites Struggle for Public Acceptance. (2010, May 22). *The Jakarta Post* retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/22/transvestites-struggle-public-acceptance.html>
- Waria Rame-Rame Demonstrasi Tolak Diskriminasi*. (2009, May 4th). *Tempo* retrieved from <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/05/04/brk,20090504-174285,id.html>
- www.depukumham.go.id